



**SABTU, 28 JULI 2018**

**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Laporan Bantuan Hibah Ke BPKAD**

**BENGKULU, BE** - Pendataan aset sekolah yang saat ini dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, tidak hanya untuk aset yang bersumber dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) dan Bantuan Operasional (BOS) saja. Bantuan atau hibah pun juga harus dilaporkan ke BPKAD.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bengkulu Dra Rosmayetti MM mengatakan, rekonsiliasi data aset seluruh sekolah mulai tingkat TK, SD dan SMP bukan hanya yang bersumber dana BOS, sekolah yang mendapat bantuan hibah dari lain juga harus dilaporkan.

"Bagi sekolah yang dapat bantuan dari BUMN Atau US ARMY dan pihak lainnya, agar lapor dan masukkan ke simda aset," katanya.

Rekonsiliasi aset sebagai

wadah bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, untuk mengetahui berapa banyak aset yang masih layak dan tidak. Tertib administrasi dan aset ini didorong untuk perolehan predikat wajar tanpa pengecualian pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nantinya.

Seperti diketahui, BPKAD telah melaksanakan rekonsiliasi aset di aula Dinas Dikbud Kota Bengkulu. Rekonsiliasi aset itu baru dilakukan untuk tahap semester satu yang bersumber dari BOS. Kegiatan yang dilaksanakan di aula Dinas Dikbud itu digelar selama tiga hari. Dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Kepala Bidang Aset DPKAD, Hoirul Mu'asy menuturkan, rekonsiliasi kegiatan rutin yang diselenggarakan DPKAD. Sekolah diminta melaporkan aset yang ber-

sumber dari dana BOS.

"Tidak semua dana BOS dibelanjakan jadi aset. Makanya kita minta apa saja aset bersumber dana BOS itu," katanya.

Agar lebih akurat, data dapat diperbaharui setiap semester sehingga laporan tersebut bisa tepat waktu. Dengan begitu harapan meraih WTP dapat terwujud. Kendala selama ini, masih ada beberapa sekolah yang belum tepat waktu melapor, karena bendahara yang dilibatkan juga dari guru sehingga mengganggu proses pengimputan data.

Dalam rekonsiliasi ini, DPKAD juga menyiapkan jasa instal sehingga bagi sekolah-sekolah yang mengalami kendala dalam log in pada sistem dapat dibantu oleh tim yang disiapkan.

"Kita targetkan tiga hari ini masing-masing sekolah sudah bisa melaporkan aset mereka," tutupnya. (247)